

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan, maka kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan dapat dikatakan kinerjanya sangat bagus. Apabila pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan, maka kinerjanya kurang baik.

Keuangan daerah dapat diartikan sebagai jumlah pendapatan dan pengeluaran suatu lembaga atau organisasi, apabila jumlah pendapatan meningkat maka dapat dikatakan kinerja keuangannya efektif atau efisien, namun sebaliknya jika jumlah pengeluaran lebih besar dari pendapatan maka kinerja keuangan dapat dikatakan tidak efektif atau efisien.

Dalam pengelolaan keuangan suatu lembaga atau organisasi seperti lembaga pemerintahan khususnya pemerintahan daerah perlu adanya tingkat pencapaian kinerja yang baik sebagai bentuk pelayanan pemerintah daerah yang dapat membantu meningkatkan pembangunan di berbagai bidang demi kesejahteraan masyarakat. Hal ini berkaitan dengan Kinerja keuangan yang pada dasarnya merupakan suatu ukuran kinerja menggunakan indikator keuangan. Agustina (2016) mendefinisikan bahwa Kinerja Keuangan daerah merupakan tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang

ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD. Adhiantoko (2016) menambahkan pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan pembandingan skema dan pelaksanaannya. Selain itu dapat juga digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja khususnya keuangan pemerintah daerah pada periode berikutnya.

Analisis keuangan dapat diartikan sebagai usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan Laporan Keuangan yang tersedia. Analisis rasio keuangan daerah sebagai salah satu alat untuk menilai atau mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerah terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Abdul Halim, 2007). Halim juga menyebutkan tujuan analisis keuangan daerah

adalah untuk menilai atau mengukur Kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, Efisiensi dan efektivitas dalam merealisasikan pendapatan daerah, Sejauh mana aktivitas Pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatannya, Kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah dan Pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Selain penggunaan analisis keuangan daerah sebagai alat untuk mengukur kinerja keuangan daerah perlu adanya tolak ukur yang digunakan sebagai alat

untuk mempertanggungjawabkan kemandirian, efisiensi dan efektifitas, kontribusi, serta pertumbuhan dan perkembangan pendapatan dan pengeluaran keuangan daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan pemberian informasi keuangan melalui laporan keuangan. Laporan Keuangan pada dasarnya dapat diartikan sebagai gambaran atau laporan tentang posisi keuangan yang dapat dibuat melalui pembukuan keuangan baik Laporan Keuangan bulanan ataupun tahunan. Penggunaan Laporan Keuangan bertujuan menyajikan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermantaaat bagi sebagian besar pemakai Laporan Keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Penggunaan analisis rasio keuangan pada sektor publik belum begitu banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan mengenai nama dan ka idah pengukurannya (Abdul Halim, 2007 : 231). Meski demikian diperlukan pengukuran atau penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Mardiasmo (2002) menyebutkan ada beberapa tujuan penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yakni: Untuk memperbaiki kinerja pemerintah, untuk membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja sehingga pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas dalam memberikan pelayanan publik serta untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan Untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Selain itu Halim (2007) juga menyebutkan terdapat beberapa cara mengukur atau menilai kinerja keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan Beberapa rasio yakni:

1. Rasio Efektivitas PAD yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan (Mahmudi, 2016).
2. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.
3. Rasio Kekeragaman yang menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Rutin dan Belanja Pembangunannya secara optimal.
4. Rasio Pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggaran mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif (Mahmudi, 2016).
5. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah yang menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Kabupaten Timor Tengah Selatan merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang masih tergolong Kabupaten dengan tingkat pembangunan yang rendah dalam pengelolaan potensi sumber daya alam

khususnya pengelolaan di bidang keuangan daerah. Terdapat beberapa permasalahan pengelolaan keuangan yang paling menonjol Menurut tim Aliansi Rakyat Anti Korupsi (ARAKSI 2017) dalam rapat hasil cermatan terhadap pengelolaan keuangan daerah khususnya pengelolaan APBD Kabupaten Timor Tengah Selatan, terdapat 3 permasalahan keuangan yakni Belum adanya kebijakan umum mengenai anggaran dan prioritas anggaran sementara dalam pengelolaan APBD, Belum adanya Perda yang menindaklanjuti pengelolaan keuangan khususnya pengelolaan APBD dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang Dana Pemekaran 38 desa di Kabupaten TTS salah satunya desa Oeua, Kecamatan Kuantana, dan Pengelolaan APBD sebesar 174 M belum jelas. Hal ini dirincikan melalui utang Pemda sebesar 76M, gagal tender sebanyak 8 paket pekerjaan fisik pada tahun 2017 sebesar 20M, dan terdapat temuan BPK sebesar 24M yang belum disikapi secara serius oleh Penegak Hukum. Melihat permasalahan- permasalahan yang masih terjadi di Kabupaten Timor Tengah Selatan maka dibutuhkan pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap tingkat pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel.

Untuk meningkatkan keefektifitasan pelayanan pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan di bidang pembangunan maka dibutuhkan pula pemberian informasi keuangan daerah oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam meningkatkan perwujudan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui Laporan Keuangan sebagai alat pengendalian dan evaluasi kinerja pemerintah daerah sehingga adanya tingkat kepuasan masyarakat terhadap tingkat kinerja keuangan pemerintah Kabupaten setempat. (Mahmudi, 2016) mendukung bahwa Laporan Keuangan pemerintah daerah adalah suatu alat pengendalian dan evaluasi kinerja bagi pemerintah daerah secara keseluruhan maupun unit - unit kerja di dalamnya Fungsi utama dari laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Akan tetapi masih banyak pihak yang belum memahami atau bisa membaca Laporan Keuangan dengan baik. Hal tersebut wajar karena berbagai pihak yang berkepentingan tersebut berasal dari latar belakang yang berbeda dan tidak memahami akuntansi. Padahal mereka sangat membutuhkan informasi keuangan tersebut untuk pembuatan keputusan, oleh karena itu dibutuhkanlah analisis Laporan Keuangan untuk membantu mereka dalam menganalisis suatu Laporan Keuangan dapat menggunakan berbagai metode dan salah satunya yang paling banyak digunakan adalah analisis rasio keuangan.

Dengan adanya penggunaan metode analisis rasio keuangan seharusnya pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan harus lebih berani dan

mampu memaksimalkan berbagai potensi yang dimilikinya. Sehingga berbagai permasalahan yang telah dijelaskan di atas tadi berangsur-angsur mulai teratasi. Pada kenyataannya kebanyakan kota-kota kecil di seluruh Indonesia masih belum bisa mandiri dalam hal pengelolaan kinerjanya. Banyak pejabat-pejabat daerah yang justru berbuat tidak semestinya dengan melakukan berbagai penyimpangan, yang bisa menimbulkan dampak yang buruk bagi masyarakat daerah yang bersangkutan. Untuk itulah peran masyarakat sebagai subyek dan obyek pembangunan sangat diperlukan untuk selalu memantau dan mengawasi kinerja pemerintah daerah.

Dalam kaitan dengan penelitian ini, Pramita (2015) sebelumnya melakukan penelitian yang sama tentang “Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2013”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2009-2013 dilihat dari : (1) Rasio Efektivitas PAD, (2) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, (3) Rasio Keserasian, (4) Rasio Pertumbuhan, dan (5) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.

Berangkat dari penelitian terdahulu yang disebutkan di atas maka untuk melakukan penilaian atau pengukuran kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan maka dibutuhkan analisis rasio keuangan sebagai tolak ukur penilaian kinerja keuangan Pemerintah Daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dan wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan atas sumber daya yang dihimpun dari masyarakat.

Melihat pentingnya analisis kinerja keuangan pemerintah Kabupaten melalui rasio – rasio seperti yang disebutkan diatas maka dapat diartikan bahwa Analisis kinerja pengelolaan keuangan dan kemandirian pemerintah Kabupaten adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan pemerintah Kabupaten dalam bidang keuangan untuk kurun waktu tertentu.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan dilihat dari rasio-rasio yang disebutkan oleh Halim (2007) dengan melakukan penelitian berjudul “*Analisis Rasio keuangan dalam Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2012-2017*”.

1.2. Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah Analisis Kinerja Keuangan daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

1.3. Persoalan Penelitian

Untuk mengetahui:

Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan analisis rasio keuangan?

1.4. Tujuan dan Manfaat penelitian

1. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dilihat dari Rasio keuangan.

2. Manfaat Penelitian.

a. Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi atau sumbangan pemikiran Pemerintah Daerah di dalam menganalisis Kinerja Keuangan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada perkembangan zaman yang semakin kompetitif.

b. Manfaat Praktis

- a. Bagi pembaca penelitian ini merupakan media untuk belajar memecahkan masalah secara ilmiah dan pengaruh Penerapan teori Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Kecerassian, Rasio Pertumbuhan, dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah untuk menganalisis kinerja Pengelolaan Keuangan dan Kemandirian Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan .
- b. Bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan tambahan pengetahuan dan sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama.
- c. Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan diharapkan untuk mengambil keputusan yang tepat dan relefan dalam mengelola Anggaran Pendapatan Asli Daerah.